

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Dewan Komisaris

2.1.1.1 Pengertian Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan seorang yang melakukan pengendalian internal dalam suatu perusahaan, yang tugasnya melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada para direksi. Dan juga memonitor semua tindakan yang dilakukan manajemen (Erawati & Herlina, 2021).

Sedangkan dewan komisaris menurut Karunia & Rusyfan (2021:68) pengertian dewan komisaris, sebagai berikut:

“Dewan komisaris ini dipilih karena latar belakang dan keahlian yang dimilikinya untuk memperoleh keputusan yang independen demi kepentingan perusahaan. Secara umum, dewan komisaris ini merupakan sebagai pendorong dalam setiap prosedur perusahaan.”

Dewan komisaris ini memiliki peranan yang sangat penting dalam melakukan pengungkapan CSR, karena dewan komisaris ini sebagai perwakilan dari para pemangku kepentingan untuk melakukan tugas pengawasan pada kinerja dan sosial perusahaan. Peranan dewan komisaris ini harus sejalan dengan kegiatan usahanya yaitu dengan mengendalikan proses kinerjanya agar perusahaan

mendapatkan citra yang baik di mata masyarakat, dan pastinya di setiap perusahaan memiliki susunan organisasi dari dewan komisaris (Gladiola & Wirjawan, 2021).

2.1.1.2 Tugas Dewan Komisaris

Berdasarkan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 115 ayat 1, yaitu: Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota dewan komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.

Ketentuan mengenai tanggung jawab direksi dan/atau dewan komisaris atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam undang-undang ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang hukuman pidana.

Tugas dewan komisaris adalah melakukan monitoring atau pengawasan terhadap kinerja direksi dan tatakelola perusahaan. Dewan komisaris juga harus bisa memberikan nasihat terkait kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan. Selain itu juga dewan komisaris ini memberikan laporan pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan dan juga pemegang saham (Mulianita et al., 2019).

2.1.1.3 Pengukuran Dewan Komisaris

Menurut (Jannah, 2022), pengukuran dewan komisaris bisa menggunakan rumusan dibawah ini, yaitu:

$$DK = \Sigma \text{ Total Dewan Komisaris}$$

Menurut (Wardati et al., 2021), pengukuran dewan komisaris bisa menggunakan rumusan dibawah ini, yaitu:

$$DK = \text{Jumlah Anggota Dewan Komisaris}$$

2.1.2 Komite Audit

2.1.2.1 Pengertian Komite Audit

Komite audit merupakan kelompok pendukung yang ada di bawah dewan komisaris, yang dibentuk untuk membantu dewan komisaris dalam rangka untuk mendukung dalam hal efektivitas suatu tugas dan fungsi pengawasan, yang berkaitan dengan laporan keuangan maupun sistem pengendaliannya.

(Anam & Wibisono, 2023) mengatakan bahwa komite audit ini bisa menjadi tangan kanan dari dewan komisaris, sebab tugas dari komite audit tidak jauh berbeda dengan dewan komisaris yaitu melakukan pengawasan/ memonitor perusahaan yang berkaitan dengan laporan keuangan.

Komite audit ini juga bisa menjadi jembatan penghubung antara manajemen dan dewan komisaris. Komite audit ini, memiliki sifat yang independensi disebabkan tuntutan pekerjaan yang tidak boleh dipengaruhi oleh pihak lain saat melakukan pengawasan. Sebab hasil temuan dari komite audit ini bersifat objektif dengan artian sesuai dengan kondisi nyata perusahaan (Tambunan, 2021).

2.1.2.2 Tanggung Jawab dan Tugas Komite Audit

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Pasal 10 yang menyatakan bahwa, dalam menjalankan fungsinya komite audit memiliki tugas dan tanggung jawab minimum meliputi:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau perusahaan Publik kepada publik dan/ atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan emiten atau perusahaan publik.
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan emiten atau perusahaan publik.
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas temuan auditor internal.
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh direksi, jika emiten atau perusahaan publik tidak memiliki fungsi pemantauan risiko dibawah dewan komisaris.
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan emiten atau perusahaan publik.

- h. Menelaah dan memberikan saran kepada dewan komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan emiten atau perusahaan publik.

Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi emiten atau perusahaan publik.

2.1.2.3 Pengukuran Komite Audit

Menurut (Katoppo & Nustini, 2022) Pengukuran komite audit bisa menggunakan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Komite Audit} = \Sigma \text{Anggota Komite Audit di Perusahaan}$$

Menurut (Septiana & Aris, 2023), pengukuran komite audit bisa menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AC = \frac{\text{Komisaris Independen Dalam Komite Audit}}{\text{Jumlah Komite Audit}}$$

2.1.3 Kepemilikan Institusional

2.1.3.1 Pengertian Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan saham yang mayoritasnya dimiliki oleh sebuah insitusi maupun kelembagaan seperti pemerintah, bank, perusahaan investasi, perusahaan berbentuk perseroan (PT), yayasan, dan lain sebagainya.

Kepemilikan dalam perusahaan bertindak sebagai pihak yang melakukan pengawasan di manajemen perusahaan, semakin besar kepemilikan institusional maka semakin besar juga peranan dan dorongan institusi dalam pengambilan keputusan untuk mengawasi manajemen (Partiwi & Herawati, 2022).

Kepemilikan insitusalional ini dapat digunakan sebagai alat yang dapat membantu mengurangi *agency conflict*. Kepemilikan institusional ini juga memiliki kemampuan yang digunakan untuk mengendalikan pihak-pihak manajemen dengan melalui proses monitoring. Biasanya kepemilikan institusional akan menyerahkan tanggung jawab untuk mengelola investasi perusahaannya kepada divisi tertentu. Jika melakukan pemantauan secara profesional, maka perkembangan invetasinya akan membuat tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen akan semakin tinggi dan hal ini akan membantu dalam menekan potensi kecurangan (Febrianto, 2020).

2.1.3.2 Pengukuran Kepemilikan Institusional

Menurut (Santo & Rahayuningsih, 2022), pengukuran kepemilikan institusional bisa menggunakan rumus dibawah ini:

$$KI = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Saham Institusional}}{\text{Total Lembar Saham yang Beredar di Perusahaan}}$$

Menurut (Immanuel & Hasnawati, 2022), pengukuran kepemilikan institusional bisa menggunakan rumus dibawah ini:

$$KI = \frac{\text{Total Kepemilikan Saham Institusional}}{\text{Total Saham Perusahaan yang Beredar}} \times 100\%$$

2.1.4 Corporate Social Responsibility Disclosure

2.1.4.1 Pengertian Corporate Social Responsibility Disclosure

CSR merupakan bentuk tanggung jawab yang dilakukan perusahaan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan maupun kesenjangan sosial yang disebabkan oleh kegiatan operasional perusahaan.

Menurut Karina & Setiadi, 2020, pengertian *Corporate social responsibility* sebagai berikut:

“CSR adalah bentuk tanggung jawab meningkatkan citra perusahaan, kegiatan CSR juga dapat digunakan sebagai salah satu keunggulan kompetitif perusahaan yang dapat meningkatkan penjualan karena dapat menarik konsumen.”

Menurut Kartini (2020:145) CSR jika dilihat dari skala perusahaan adalah sebagai alat manajemen, yakni ini untuk meminimalisir dampak negatif dari rantai input-proses-output perusahaan dan juga untuk meningkatkan nilai tambah yang dihasilkan dari kegiatan operasional perusahaan sehingga dapat meningkatkan daya saing bisnis dalam menghadapi kompetitornya.

Sedangkan menurut ISO 26000, CSR merupakan tanggung jawab dari perusahaan terhadap dampak dari semua keputusan, kegiatan masyarakat, serta lingkungan yang dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang harus sejalan dengan pembangunan berkelanjutan.

CSR ini juga disebut sebagai komitmen bisnis dalam memberikan kontribusi, melalui kerja sama dengan para karyawan, kelompok-kelompok, dan juga masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas hidup yang hal ini akan bermanfaat bagi konsep *sustainability development* (pembangunan berkelanjutan).

Kegiatan CSR berkelanjutan ini memberikan dampak positif baik itu untuk perusahaan sendiri maupun para stakeholder, kegiatan CSR ini juga dapat menciptakan kehidupan masyarakat lebih nyaman, sejahtera, dan mandiri (Khofifah et al., 2022).

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan atau bisa juga disebut *social disclosure*, *corporate social reporting*, *social accounting* maupun *corporate social responsibility*. CSRD adalah sebuah proses yang pengkomunikasian dampak sosial maupun lingkungan dari kegiatan operasional terhadap sekelompok yang berkepentingan dan semua masyarakat. Hal ini akan membuat perusahaan lebih memperluas tanggung jawab, di luar peran perusahaan dalam menyediakan laporan keuangan kepada stakeholder, dan para pemegang saham (E. R. Sembiring, 2020).

2.1.4.2 Komponen-Komponen *Corporate Social Responsibility Disclosure*

Menurut M. Fahmi (2019) komponen CSR sebagai berikut:

1. Hak Asasi Manusia (HAM)

Perusahaan harus menanggapi masalah yang bersangkutan dengan HAM. Perusahaan juga harus bisa mencari cara untuk dapat terhindar dari pelanggaran HAM.

2. Tenaga Kerja (Buruh)

Perusahaan harus bisa memberikan *privilege* untuk para tenaga kerjanya dari mulai gaji yang sesuai umur, keselamatan kerja, kesehatan, kesejahteraan hari tua, dan sebagainya.

3. Lingkungan Hidup

Perusahaan harus bisa membuat strategi dan kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Perusahaan harus bisa mencari solusi untuk mengatasi dampak negatif dari aktivitas perusahaan.

4. Sosial - Masyarakat

Perusahaan harus membuat semacam strategi baik di dalam bidang sosial dan juga cara mengembangkannya di masyarakat sekitar perusahaan.

5. Dampak Produk dan Jasa terhadap Pelanggan

Perusahaan harus bisa memastikan keamanan produk dan jasa yang mereka jual terbebas dari dampak-dampak negatif yang dapat mempengaruhi kesehatan, dan sebagainya.

2.1.4.3 Manfaat Menerapkan *Corporate Social Responsibility Disclosure*

CSR merupakan salah satu skema yang dibuat perusahaan sebagai bisnis baik itu dalam jangka panjang maupun pendek. Menurut M. Fahmi (2019) manfaat yang didapatkan jika dilakukannya CSR dalam perusahaan, sebagai berikut:

1. Mempertahankan reputasi dan nama baik perusahaan.
2. Perusahaan mendapatkan izin beroperasi.
3. Mereduksi bisnis perusahaan.
4. Meluaskan jalan masuk bagi sumber daya yang akan digunakan oleh operasional.
5. Membuka peluang bagi perusahaan untuk mempromosikan diri di kanca yang lebih besar dan luas.
6. Memotong biaya, contohnya dengan dampak dari pembuangan limbah.

7. Memperbaiki hubungan bisnis dengan para investor dan juga dengan para regulator.

Dengan adanya CSR ini akan lebih mempermudah dalam membuat suatu keseimbangan antara perusahaan, masyarakat sekitar, dan juga lingkungan.

2.1.4.4 Pengukuran *Corporate Social Responsibility Disclosure*

Pengukuran CSR ini bisa menggunakan proksi CSRDI (*Corporate Social Responsibility Disclosure Index*) yang berdasarkan dengan indikator GRI (*Global Reporting Initiatives*). CSRDI ini pada dasarnya menggunakan pendekatan dengan pembagian 2 kelompok, yang setiap item CSR dalam penelitian akan diberi nilai 1 jika perusahaan mengungkapkan CSR dan nilai 0 jika perusahaan tidak mengungkapkan CSR.

Menurut (Yunaida & Lestari, 2020), pengukuran pengungkapan CSR ini bisa menggunakan rumus seperti dibawah ini:

$$CSRDI = \frac{\sum X_{ij}}{N_j}$$

Keterangan:

CSRDI: *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* perusahaan

$\sum X_{ij}$: Jumlah item yang diungkapkan oleh perusahaan

N_j : Jumlah item yang seharusnya diungkapkan, $n_j = 113$

Salah satu indikator yang digunakan saat ini adalah standar GRI. Standar GRI ini merupakan suatu praktik yang terbaik secara global untuk melaporkan berbagai dampak dari mulai ekonomi, lingkungan, dan sosial secara publik. Standar GRI

ini juga dapat digunakan semua maupun sebagian sesuai kebutuhan untuk melaporkan informasi secara spesifik. Seperti penjelasan dibawah ini, yaitu:

1. Standar GRI 102 dengan 33 item pengungkapan.
2. Standar GRI 103 dengan 3 item pengungkapan.
3. Standar GRI 200 dengan 13 item pengungkapan.
4. Standar GRI 300 dengan 30 item pengungkapan.
5. Standar GRI 400 dengan 34 item pengungkapan.

Dibawah ini, penjelasan mengenai indikator Standar GRI dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Indikator CSRD

No	Pengungkapan Standar GRI	Indikator Pengungkapan
GRI 102		
Profil Organisasi		
1	GRI 102-1	Nama Organisasi
2	GRI 102-2	Kegiatan, Merek, Produk, dan Jasa
3	GRI 102-3	Lokasi Kantor Pusat
4	GRI 102-4	Lokasi Operasi
5	GRI 102-5	Kepemilikan dan Bentuk Hukum
6	GRI 102-6	Pasar yang dilayani
7	GRI 102-7	Skala Organisasi
8	GRI 102-8	Informasi mengenai karyawan dan pekerja lain
9	GRI 102-9	Rantai Pasokan
10	GRI 102-10	Perubahan signifikan pada organisasi dan rantai pasokannya
11	GRI 102-11	Pendekatan atau prinsip pencegahan
12	GRI 102-12	Inisiatif eksternal
13	GRI 102-13	Keanggotaan asosiasi
Stategi		
14	GRI 102-14	Pernyataan dari pembuat keputusan senior
Etika & Integritas		

No	Pengungkapan Standar GRI	Indikator Pengungkapan
15	GRI 102-16	Nilai, prinsip, standar, dan norma perilaku
Tata Kelola		
16	GRI 102-18	Struktur tata kelola
Keterlibatan Pemangku Kepentingan		
17	GRI 102-40	Daftar kelompok pemangku kepentingan
18	GRI 102-41	Perjanjian perundingan kolektif
19	GRI 102-42	Mengidentifikasi dan memilih pemangku kepentingan
20	GRI 102-43	Pendekatan terhadap keterlibatan pemangku kepentingan
21	GRI 102-44	Topik utama dan masalah yang dikemukakan
Praktik Pelaporan		
22	GRI 102-45	Entitas yang termasuk dalam laporan keuangan dikonsolidasi
23	GRI 102-46	Menetapkan isi laporan dan batasan topik
24	GRI 102-47	Daftar topik material
25	GRI 102-48	Penyajian kembali informasi
26	GRI 102-49	Perubahan dalam pelaporan
27	GRI 102-50	Periode pelaporan
28	GRI 102-51	Tanggal laporan terbaru
29	GRI 102-52	Siklus pelaporan
30	GRI 102-53	Titik kontak untuk pertanyaan mengenai laporan
31	GRI 102-54	Klaim bahwa pelaporan sesuai dengan standar GRI
32	GRI 102-55	Kalimat bahwa pelaporan sesuai dengan standar GRI
33	GRI 102-56	Assurance dari pihak eksternal
GRI 103		
Pendekatan Manajemen		
1	GRI 103-1	Assurance dari pihak eksternal
2	GRI 103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya
3	GRI 103-3	Evaluasi pendekatan manajemen
GRI 201		
Performa Ekonomi		
1	GRI 201-1	Nilai ekonomi langsung yang diatribusikan
2	GRI 202-2	Implikasi finansial serta risiko dan peluang akibat dari perubahan iklim
3	GRI 203-3	Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya
4	GRI 204-4	Bantuan finansial yang diterima pemerintah
Keberadaan Pasar		
5	GRI 202-1	Rasio standar upah karyawan entry level berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minuman regional

No	Pengungkapan Standar GRI	Indikator Pengungkapan
6	GRI 202-2	Proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat lokal
Dampak Ekonomi Tidak Langsung		
7	GRI 203-1	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan
8	GRI 203-2	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan
Praktik Pengadaan		
9	GRI 204-1	Proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal
Anti Korupsi		
10	GRI 205-1	Operasi-operasi yang di nilai memiliki risiko taeakit korupsi
11	GRI 205-2	Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan prosedur anti korupsi
12	GRI 205-3	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil
Perilaku Anti Persaingan		
13	GRI 206-1	Langkah-langkah hukum untuk perilaku anti persaingan, praktik anti- <i>trust</i> da monopoli
GRI 300		
Material		
1	GRI 301-1	Material yang digunakan berdasarkan berat atau volume
2	GRI 301-2	Material <i>inpt</i> dari daur ulang yang digunakan
3	GRI 301-3	Produk reclaimed dan material kemasannya
Energi		
4	GRI 302-1	Konsumsi energi dalam organisasi
5	GRI 302-2	Konsumsi energi di luar organisasi
6	GRI 302-3	Intensitas energi
7	GRI 302-4	Pengurangan konsumsi energi
8	GRI 302-5	Pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa
Air		
9	GRI 303-1	Pengambilan air berdasarkan sumber
10	GRI 303-2	Sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air
11	GRI 303-3	Daur ulang dan penggunaan air kembali
Keanekaragaman Hayati		
12	GRI 304-1	Lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola, atau berdekatan dengan kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan lindung
13	GRI 304-2	Dampak siginifikan dari kegiatan, produk, dan jasa pada keanekaragaman hayati

No	Pengungkapan Standar GRI	Indikator Pengungkapan
14	GRI 304-3	Habitat yang dilindungi atau direstorasi
15	GRI 304-4	Spesies daftar merah IUCN dan spesies daftar konservasi nasional dengan habitat dalam wilayah yang terkena efek operasi
Emisi		
16	GRI 305-1	Emisi GRK (cakupan 1) langsung
17	GRI 305-2	Emisi GRK (cakupan 2) tidak langsung
18	GRI 305-3	Emisi GRK (cakupan 3) Tidak langsung lainnya
19	GRI 305-4	Intensitas emisi GRK
20	GRI 305-5	Pengurangan emisi GRK
21	GRI 305-6	Emisi zat perusak ozon (ODS)
22	GRI 305-7	Nitrogen oksida, sulfur oksida, dan emisi udara yang signifikan lainnya
Air Limbah dan Limbah		
23	GRI 306-1	Pelepasan air berdasarkan kualitas dan tujuan
24	GRI 306-2	Limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan
25	GRI 306-3	Tumpahan yang signifikan
26	GRI 306-4	Pengangkutan limbah berbahaya
27	GRI 306-5	Badan air yang dipengaruhi oleh pelepasan dan/atau limbah air
Kepatuhan		
28	GRI 307-1	Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan tentang lingkungan hidup
Penilaian Lingkungan Pemasok		
29	GRI 308-1	Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria lingkungan
30	GRI 308-2	Dampak lingkungan negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil
GRI 400		
Kepegawaian		
1	GRI 401-1	Perejutan karyawan baru dan pergantian karyawan
2	GRI 401-2	Tunjangan yang diberikan kepada masyarakat sementara atau cutih paruh waktu.
3	GRI 401-3	Cuti melahirkan
Hubungan Tenaga Kerja atau Manajemen		
4	GRI 402-1	Periode pemberitahuan terkait perubahan operasional
Kesehatan dan Keselamatan Kerja		
5	GRI 403-1	Perwakilan pekerjaan dalam komite resmi gabungan manajemen-pekerjaan untuk kesehatan dan keselamatan

No	Pengungkapan Standar GRI	Indikator Pengungkapan
6	GRI 403-2	Jenis kecelakaan kerja dan tingkat kecelakaan kerja, penyakit akibat pekerjaan, hari kerja yang hilang, dan ketidakhadiram, serta jumlah kematian terkait pekerjaan
7	GRI 403-3	Para pekerja dengan risiko kecelakaan atau penyakit berbahaya tinggi terkait dengan pekerjaan mereka
8	GRI 403-4	Topik kesehatan dan keselamatan tercakup dalam perjanjian resmi dengan serikat buruh
Pelatihan dan Pendidikan		
9	GRI 404-1	Rata-rata pelatihan pertahun per karyawan
10	GRI 404-2	Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan
11	GRI 404-3	Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier
Keanekaragaman dan Kesempatan Kerja		
12	GRI 405-1	Keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan
13	GRI 405-2	Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan dengan laki-laki
Non Diskriminasi		
14	GRI 406-1	Insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan dan dilakukan
Kebebasan Berserikat & Perundingan Kolektif		
15	GRI 407-1	Operasi dari pemasok dimana hak atas kebebasan berserikat dan perundingan kolektif mungkin berisiko
Pekerja Anak		
16	GRI 408-1	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden pekerja anak
Kerja Paksa atau Wajib Kerja		
17	GRI 409-1	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden kerja paksa atau wajib kerja
Praktik Keamanan		
18	GRI 410-1	Petugas keamanan yang dilatih mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia
Hak-Hak Masyarakat Adat		
19	GRI 411-1	Insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat
Penilaian Hak Asasi Manusia		
20	GRI 412-1	Operasi-operasi yang telah melewati tinjauan hak asasi manusia atau penilaian dampak
21	GRI 412-2	Pelatihan karyawan mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia

No	Pengungkapan Standar GRI	Indikator Pengungkapan
22	GRI 412-3	Perjanjian dan kontrak investasi signifikan yang memasukan klausul-klausul hak asasi manusia atau yang telah melalui penyaringan hak asasi manusia
Masyarakat Lokal		
23	GRI 413-1	Operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan program pengembangan
24	GRI 413-2	Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal
Penilaian Sosial Pemasok		
25	GRI 414-1	Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria sosial
26	GRI 414-2	Dampak sosial negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil
Kebijakan Publik		
27	GRI 415-1	Kontribusi publik
Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan		
28	GRI 416-1	Penilaian dampak kesehatan dan keselamatan kerja dari berbagai kategori produk dan jasa
29	GRI 416-2	Insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa
Pemasaran dan Pelabelan		
30	GRI 417-1	Persyaratan untuk pebelan dan informasi produk dan jasa
31	GRI 417-2	Insiden ketidakpatuhan terkait pebelan dan informasi produk dan jasa
32	GRI 417-3	Insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran
Privasi Pelanggan		
33	GRI 418-1	Pengaduan yang berdasar mengenai pelanggan dan hilangnya dataa pelanggan
Kepatuhan Ekonomi		
34	GRI 419-1	Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan dibidang sosial dan ekonomi

Sumber: www.globalreporting.org

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Variabel Penelitian	Hasil
1	(Fapila, 2023)	Pengaruh Manajemen Laba, Karakteristik Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Media <i>Exposure</i> Terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2018-2020)	Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Komite Audit berpengaruh positif terhadap pengungkapannya CSR.
2	(Susanto & Mulyani, 2023)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi <i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i> (CSRD) di Indonesia: Meta Analisis	Dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap CSRD Kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan terhadap CSRD
3	(Sitepu et al., 2023)	Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, <i>Free Cash Flow</i> , dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Corporate Social Responsibility</i> pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Komite audit berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pengungkapan CSR.

No	Nama Penulis	Variabel Penelitian	Hasil
4	(Susanti et al., 2022)	Determinan Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>	Dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.
5	(Effendy et al., 2022)	Determinasi <i>Corporate Governance</i> Terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Tinjauan pada Perusahaan Perbankan di Indonesia	Komite audit tidak berpengaruh terhadap CSR Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap CSR
6	(Giovany, 2021)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris, dan Umur Perusahaan Terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia	Dewan Komisaris positif berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.
7	(Hengky, 2021)	Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> dan Kepemilikan Institusional Terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman Di Bursa Efek Indonesia	Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.
8	(Rivandi & Putra, 2021)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan Komite Audit Terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>	Komite audit tidak berpengaruh (Putri & Fanggidae, 2021)
9	(Putri & Fanggidae, 2021)	Pengaruh Kepemilikan Institusioal, Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit Terhadap <i>Corporate Social Responsibility</i>	Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap CSR.

No	Nama Penulis	Variabel Penelitian	Hasil
			Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap CSR.
10	(Vanessa & Meiden, 2020)	Beberapa Faktor yang Mempengaruhi CSR Disclosure Pada Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2018.	Komite audit berpengaruh secara signifikan dengan arah positif terhadap pengungkapan CSR.
11	(Sihombing et al., 2020)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan, dan Ukuran Komite Audit Terhadap Pengungkapan CSR.	Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.
12	(Nurkasnah, 2020)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI tahun 2014-2018).	Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.
13	(Yani & Suputra, 2020)	Pengaruh Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional, dan Leverage Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility.	Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.
14	(Nurbayanti, 2020)	Analisis Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility	Dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.

No	Nama Penulis	Variabel Penelitian	Hasil
15	(Nurhandika & Rahimi, 2020)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	Komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan CSR.
16	(Setyawan et al., 2020)	Efek Kepemilikan Institusional, Kinerja Perusahaan, Kualitas Audit terhadap Luas Pengungkapan CSR Perusahaan Pertambangan	Kepemilikan Institusional berpengaruh luas terhadap pengungkapan CSR
17	(Rivandi & Putra, 2019)	Pengaruh Dewan Komisaris dan Komite Audit Terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> (Studi Empiris Perusahaan High Profile Di Bursa Efek Indonesia).	Dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Komite Audit dapat berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.
18	(Chen, 2019)	Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris dan Kepemilikan Asing Terhadap Luas Pengungkapan CSR.	Dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.
19	(Andayani & Yusra, 2019)	Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Komite Audit Terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Sumber: www.google.com

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap CSR

Dalam pembahasan hasil penelitian yang dilakukan oleh Jannah (2022), Kartika & Yuyetta (2020), dan Aulia & Aini (2020) memiliki hasil penelitian yang berbeda, yaitu:

Jannah (2022) berpendapat adanya hubungan antara dewan komisaris dengan pengungkapan CSR. Dewan komisaris akan menyusun/ mengatur kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan di perusahaan, hal ini akan meningkatkan dan memperluas pengungkapan CSR. Maka hasil penelitian yang dilakukan jannah bahwa, dewan komisaris berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Sedangkan Kartika & Yuyetta (2020) berpendapat bahwa dewan komisaris ini dapat memberikan sebuah pengaruh yang cukup kuat untuk menekan manajemen dalam mengungkapan CSR. Semakin besar jumlah dewan komisaris didalam perusahaan maka tingkat pengawasan akan semakin efektif dan luas. Maka hasil penelitian yang dilakukan kartika & Yuyetta bahwa, dewan komisaris dapat berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.

Berbeda dengan Aulia & Aini (2020) berpendapat bahwa jumlah dewan komisaris tidak membuat pengungkapan CSR menjadi lebih luas. Sebab dewan komisaris ini menitik beratkan kepada kepercayaan dan nilai yang bisa diterima oleh perusahaan tanpa mengungkapan CSR. Maka penelitian ini bahwa, dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR.

2.2.2 Pengaruh Komite Audit Terhadap CSRD

Vanessa & Meiden (2020) membahas di dalam penelitiannya bahwa komite audit sangat mendorong manajemen perusahaan dalam mengungkapkan CSR menggunakan *sustainability report* yang berguna untuk memberikan informasi kepada para *stakeholder* dan hal ini akan memperoleh sebuah kepercayaan dari para pemaku kepentingan. Komite audit juga sesuai fungsinya yaitu melakukan pengawasan sehingga keberadaanya akan maksimal dalam pengungkapan CSR. Semakin banyak komite audit maka semakin kuat juga fungsi pengawasannya, dan hal ini akan menekan manajemen untuk memperluas pengungkapan CSR. Maka dari penelitian ini, komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jauhari & Segarawasesa (2021), didalam POJK No. 55/POJK.04/2015 pasal 10 yang membahas terkait tugas dan tanggung jawab dari komite audit, secara garis besar tugas dari komite audit yaitu melakukan pengawasan internal bagi perusahaan, salah satu pihak yang tidak memiliki wewenang dalam mendorong pengungkapan CSR ini. Maka dari penelitian ini, komite audit berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR.

Sedangkan menurut Hendi et al., (2022) komite audit merupakan salah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang ditugaskan untuk mengawasi dan mengendalikan, hal ini menciptakan keadilan, keterbukaan, dan juga responsibilitas. Faktor-faktor ini akan pasti mengarah kepada laporan keuangan yang berkualitas baik. Independensi komite audit akan sangat mempengaruhi objektif dan juga dapat mempengaruhi independensi dari pihak auditor eksternal.

Komite audit juga selain mengawasi audit eksternal tetapi juga internal perusahaan agar dapat terkendali dan juga manajemen perusahaan dalam menyediakan laporan keuangan yang berkualitas tinggi. Maka, penelitian ini menunjukkan komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.

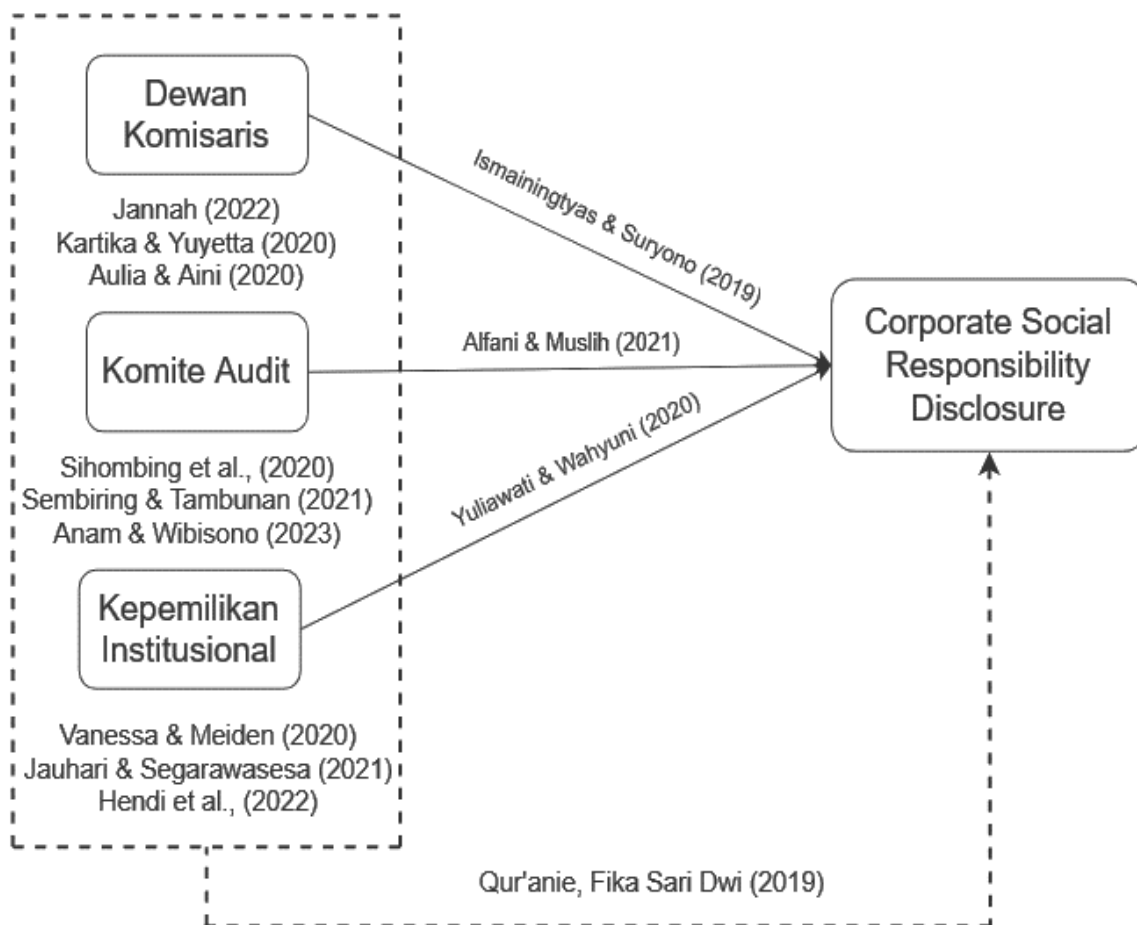
2.2.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap CSR

Menurut Sihombing et al., (2020) Semakin tinggi kepemilikan institusional dalam perusahaan maka penungkapan CSR akan menurun maupun sebaliknya. Dengan demikian, semakin besar kepemilikan institusional maka tuntutan untuk perusahaan dalam menghasilkan laba besar, hal ini membuat perusahaan harus merasa terdorong untuk melakukan efisiensi biaya termasuk juga biaya yang akan dikeluarkan untuk kegiatan CSR. Maka, hasil penelitian ini menunjukkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Merujuk penelitian yang dilakukan oleh Sembiring & Tambunan, (2021) Semakin besar kepemilikan institusional, diharapkan pihak dari institusional akan melakukan monitor untuk pencegahan pemborosan yang akan dilakukan oleh perusahaan, dan akan membuat pemanfaat secara efisien dalam aktiva perusahaan. Kepemilikan institusional ini akan mendorong perusahaan dalam mengungkapkan CSR. Dengan meningkatnya rasio kepemilikan institusional pada perusahaan, membuat masyarakat berperan dalam mendorong perusahaan melaksanakan pengungkapan CSR nya. Maka, hasil dari penelitian kepemilikan institusional secara parsial berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.

Mengacu pada penelitian Anam & Wibisono (2023) dengan memiliki kepemilikan institusional yang besar, hal ini akan mendorong peningkatan pengungkapan CSR didalam perusahaan. Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional maka dalam pengungkapan CSR juga akan meningkat, karena ini akan menimbulkan pengawasan yang cukup besar dari pihak investor institusional, sehingga pihak dari *stakeholder* bisa melakukan pengawasan terhadap kebijakan manajemen yang lebih kuat. Maka penelitian ini, kepemilikan instutusional dapat berpengaruh terhadap pengungkapan CSR

Maka perusahaan institusi yang memiliki saham yang besar dapat mengawasi dalam pemanfaatan aktiva secara efisien, kepemilikan institusional yang tinggi akan berdampak terhadap pengawasan yang lebih besar lagi agar bisa mencegah perilaku-perilaku *oportunistic* manajer dan juga mendorong dalam hal pengungkapan CSR.



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Trisliatanto (153:2020) hipotesis yaitu:

“Hipotesis merupakan *a conjectural statement of the relation between two or more variables* yang artinya sebuah pernyataan berupa dugaan yang terdapat hubungan antara 2 variabel atau lebih”.

Berdasarkan pembahasan di atas, hipotesis yang akan sesuai dengan dengan judul penelitian “Pengaruh Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Kepemilikan

Institusional Terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* (Studi Pada Perusahaan *Food & Beverage* Yang Terdaftar Di BEI Periode 2019-2022)” yaitu:

Hipotesis 1. Terdapat pengaruh Positif Dewan Komisaris terhadap CSRD

Hipotesis 2. Terdapat pengaruh Positif Komite Audit terhadap CSRD

Hipotesis 3. Terdapat pengaruh Positif Kepemilikan Institusional terhadap CSRD

Hipotesis 4. Terdapat pengaruh Positif Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Kepemilikan Institusional terhadap CSRD